

Kembali pada Pelestarian Kehati?

Oleh HARIADI KARTODIHARDJO

Keanekaragaman hayati (kehati) sebagai suatu sifat yang melekat pada makhluk hidup bukan hanya mencakup biofisik, tetapi juga tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan sifat aneka ragam itu dapat dipertahankan.

Konsep yang menjadi dasar perlunya keanekaragaman itu merujuk keseimbangan kehidupan dan putaran energi dalam ekosistem. Ekosistem seimbang jika kehati yang ada di dalamnya dapat dipertahankan.

Kehati hanya dapat dipertahankan pemerintahan dan komunitas yang dapat menerima perbedaan cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sumber permasalahan pelestarian kehati, di sisi masyarakat, bertumpu pada soal keadilan hak dan akses terhadap sumber daya alam (Yayasan KEHATI, 2006).

Sedangkan di sisi pemerintahan, amat tergantung kemampuan mengelola sumber daya alam yang bukan didasarkan batas-batas wilayah administratif, tetapi pada batas-batas wilayah ekosistem. Informasi tentang daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan dalam pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam (Menteri Perekonomian, 2006).

Kedua sumber persoalan itu di Indonesia, sejak Earth Summit 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, yang menjadi tonggak upaya global untuk melestarikan kehati, hingga era perubahan iklim saat ini, tidak berubah. Perubahan isu melalui berbagai pertemuan internasional belum membawa arah yang jelas bagaimana kedua sumber masalah itu diatasi.

David Humphreys (2007) dalam laporan *The UNFF: Set up to fail?* mengkritik bagaimana lembaga setaraf United Nations Forum on Forests (UNFF) ada dalam inkonsistensi. Kerusakan hutan telah diketahui akibat rendahnya kepastian hak (*tenure security*) dan lemahnya pengelolaan hutan di hampir seluruh negara tropis.

Perdagangan bebas mengancam hutan tropis, tetapi perkembangannya terus didukung. Upaya sertifikasi ekolabel dalam perdagangan internasional belum di-



dukung negara-negara konsumen sumber daya alam.

Secara fundamental, kebijakan ekonomi nasional juga tak merespons kerusakan kehati maupun daya dukung lingkungan pada umumnya. Konversi hutan alam, tambang terbuka di hutan lindung, dan marginalisasi masyarakat lokal atas perkembangan investasi usaha besar diletakkan pada solusi atas kebutuhan investasi dan dampak positifnya. Implikasi bagi kerusakan modal sosial dan menurunnya daya dukung lingkungan belum diletakkan ke dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional.

Politik lingkungan

Detlef Sprinz, peneliti Postdam Institute for Climate Impact Research, Jerman, menyebutkan persoalan itu sebagai persoalan kebijakan publik jangka panjang. Karakteristik persoalan seperti itu, menurut Sprinz (2006), ditandai ketidakpastian (*time inconsistency*) karena melampaui periode masa jabatan eksekutif maupun legislatif, bahkan lintas generasi. Dari pengamatannya di beberapa negara, *time inconsistency* dijalankan baik oleh berbagai keputusan eksekutif maupun legislatif.

Disebutkan, misalnya, dijalankannya kebijakan "pemutihan" terhadap pelanggaran tata ruang sehingga upaya melanggar lembaga dalam perilaku masyarakat. Kinerja ekonomi makro dicapai dengan mengorbankan daya dukung lingkungan, akibat rasionalitas politik menganggap daya dukung sebagai sesuatu yang "tidak terlihat" atau secara politik tidak relevan dibicarakan. Hal demikian ditunjang ketidak-tahuan atau ketidakpedulian masyarakat terhadap menurunnya daya dukung lingkungan.

Studi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2006) tentang daya dukung Pulau Jawa, misalnya, menunjukkan *time inconsistency* itu. Dari perhitungan jejak ekologi (*ecological footprint*) ditunjukkan, daya dukung Pulau

Jawa sudah terlampaui (*overshoot*). Desa-desa yang lokasinya rawan banjir bandang, banjir tahunan, dan rawan longsor masing-masing berjumlah 257, 2.846, dan 1.970 desa. Dari analisis isi media (koran) ditunjukkan, selama periode 2004-2006 telah terjadi banjir, longsor, dan kekeringan masing-masing di 102, 51, dan 97 kabupaten/kota.

Sedangkan sawah yang pernah mengalami banjir, longsor, dan kekeringan masing-masing berjumlah 249.863 ha, 314.721 ha, dan 790.699 ha.

Kenyataan itu diabaikan oleh para pembuat kebijakan. Dari analisis isi 119 peraturan daerah (perda) dalam studi itu, 71 perda di antaranya bersifat eksploitatif terhadap sumber daya tanah, air, bahan tambang dan hutan, dan 41 perda di antaranya sama sekali tidak memerhatikan daya dukung lingkungan. Belum diketahui apakah perda yang memerhatikan daya dukung lingkungan itu diterapkan dalam pelaksanaannya.

Perubahan iklim

Perubahan iklim adalah simtom. Program jangka pendek untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkannya adalah memperbaiki kelembagaan, yaitu kelembagaan yang mampu menyalurkan informasi perkiraan berbagai perubahan iklim sampai di masyarakat tepat waktu.

Program jangka panjang adalah memperbaiki kegagalan pengelolaan sumber daya alam. Program ini akan efektif jika ditunjang implementasi berbagai kesepakatan internasional dalam bentuk investasi dan perdagangan yang dapat mendukung pelestarian pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan demikian, meski wacana dan aliran sumber daya global berkembang dari waktu ke waktu, dan kini semua pihak tertuju pada kata kunci "perubahan iklim", tetapi masalah yang dihadapi Indonesia tetap sama, yaitu soal kepastian hak dan akses terhadap sumber daya alam serta

kelembagaan pemerintah.

Pengalaman sejak 1980-an hingga kini tentang kegagalan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, kerusakan hutan akibat *illegal logging*, degradasi pesisir dan pantai, serta kemiskinan yang melanda masyarakat yang tinggal di dekat sumber daya alam, yaitu akibat meninggalkan upaya memperbaiki hak dan akses, lemahnya pengelolaan sumber daya alam, serta lemahnya kelembagaan pemerintah.

Kenyataan itu menunjukkan, tingginya ketersediaan biaya tidak menunjukkan arti penting perbaikan kinerja yang dikehendaki. Karena biaya yang tersedia, dari pengalaman selama ini, hanya untuk menjawab pertanyaan keliru.

Kembali ke kehati

Kunci pengelolaan sumber daya alam di negara tropis adalah "keanekaragaman". Sementara itu, perkembangan pengetahuan menuju sifat-sifat monolitik, baik demi efisiensi ekonomi, perkembangan teknologi, maupun aliran politik yang mengusungnya.

Secara umum para teknokrat dan ahli di pemerintahan maupun para peneliti di lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi dengan cerdas mengadopsi perkembangan pengetahuan itu.

Sebagai kelompok *epistemic community*, para teknokrat dan ahli itu sangat diandalkan dalam pembuatan kebijakan pembangunan umumnya. Namun, dari perkembangan selama ini, mungkin di balik kecerdasan itu ada kegagalan untuk memahami persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan dan persoalan yang "tidak terlihat", yaitu daya dukung lingkungan.

Karena itu, dalam keikutsertaan memahami masalah-masalah nasional dan global dewasa ini perlu diimbangi dengan meliha kembali hal-hal mendasar posisi geopolitik Indonesia dalam konteks pelestarian kehati.

Agenda yang perlu disusun adalah mengarusutamakan pentingnya pelestarian kehati dalam konteks perubahan masalah-masalah global, seperti perubahan iklim, dan bukan sebaliknya? Da hari ini kehati kita peringati.

HARIADI KARTODIHARDJO
Pengajar di Fakultas Kehutanan
IPB, Pascasarjana IPB dan U
Ketua Pengurus Yayasan
KEHA.